

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan BUMDes Karyasari Desa Bicornong Kecamatan Pakong

BUMDes sebagai entitas bisnis yang dibentuk melalui inisiatif masyarakat dan mengikuti prinsip kemandirian, seharusnya menempatkan perolehan modalnya sebagai prioritas utama dari partisipasi masyarakat dan Pemerintah Desa. Pendirian BUMDes dilakukan dengan tujuan yang terdefinisi dengan jelas. Realisasi tujuan tersebut termasuk memberikan layanan untuk kebutuhan usaha produktif, khususnya kelompok miskin di wilayah pedesaan, memberikan kesempatan untuk melakukan usaha dengan merata dan memberikan peningkatan pada income masyarakat di desa.¹

BUMDes merupakan langkah strategis dalam memanfaatkan berbagai potensi ekonomi lokal di suatu desa. Pendayagunaan potensi desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi di tingkat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa, yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara optimal.²

Pengelolaan menjadi kunci utama dalam menjamin keberhasilan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien untuk menggerakkan usaha dalam suatu

¹ Hasanah Dkk, *Manajemen BUMDes untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta, UM Jakarta Press 2021), 21

² Ibid

organisasi. Pengelolaan BUMDes dijalankan oleh Pemerintah Desa bersama dengan partisipasi aktif masyarakat. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan BUMDes diharapkan dapat memberdayakan perekonomian lokal dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.³

Kesuksesan BUMDes sangat bergantung pada strategi yang diterapkan pengelolanya. Keberhasilan implementasi strategi ini tergantung pada kompetensi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai perubahan dsri organsiasi atau internal dan dari pasar atau eksternal, sehingga produk dapat ditempatkan pada posisi unggul daripada pesaingnya. Sehingga perlu adanya rencana yang komprehensif supaya tujuan BUMDes bisa dicapai. Prinsip pengelolaan BUMDes perlu dijelaskan dengan rinci supaya dapatdimengerti dan diinterpretasikan dengan konsisten oleh masyarakat, pemkab, BPD, anggota dan pemerintah desanya.

Adanya BUMDes Sejatinya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pendirian BUMDes secara nasional, BUMDes didirikan didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat serta mendasarkan pada prinsip-prinsip *fairness* (Kesetaraan), transparansi, akuntabilitas, responsibilitas.

Berdasarkan hasil analisis dan temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam

³ Mario Wowor & Frans Singkoh, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso”. *EKSEKUTIF*. Vol. 3. No.3. (2019). Hal : 7 – 8.

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah terbukti berhasil pada BUMDes Karyasari di Desa Bicorong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari fairness (kewajaran/kesetaraan), transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab telah sepenuhnya terlaksana dalam operasional BUMDes tersebut. Ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, BUMDes dapat menjadi entitas yang lebih efisien, adil, dan bertanggung jawab dalam memajukan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Kesuksesan BUMDes Karyasari dapat dijadikan contoh dan menjadi inspirasi bagi BUMDes lainnya untuk mengadopsi praktik-praktik yang sama guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan dampak positifnya terhadap pembangunan di tingkat desa, serta melibatkan beberapa usaha dan program kreatif, BUMDesa Bicorong telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun ada tantangan dalam implementasi program-program tersebut, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan biogas, rencana untuk melakukan musyawarah kembali menunjukkan komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas program tersebut. Usaha jasa pembayaran dan food court di bidang wisata kuliner juga menjanjikan, memberikan kemudahan akses dan peluang pendapatan bagi masyarakat desa, sambil juga mempromosikan produk UMKM lokal. Dengan demikian, upaya BUMDesa Bicorong dalam merancang dan melaksanakan berbagai program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

masyarakat secara keseluruhan.

Penerapan prinsip-prinsip fairness, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan BUMDes ini memiliki dampak yang signifikan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa. (*pertama*) Fairness (Kewajaran/Kesetaraan): Penerapan prinsip fairness menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara di Desa Muaro Jambi, memastikan bahwa semua pihak terlibat diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Ini mendorong partisipasi aktif dari seluruh komunitas desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. (*kedua*) Transparansi: Transparansi dalam pengelolaan BUMDes penting untuk memastikan bahwa aktivitas dan keputusan yang diambil dapat dipahami dan diakses oleh semua pihak terkait. Ini tidak hanya meningkatkan nilai pemegang saham, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan masyarakat umum terwakili dan dipertimbangkan. (*ketiga*) Akuntabilitas: Pengelolaan BUMDes yang akuntabel menjamin bahwa setiap kegiatan usaha dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Dengan melakukan pemantauan dan pembukuan yang cermat, BUMDes dapat meninjau perkembangan usaha mereka dan melaporkannya kepada pemegang saham secara berkala, dan (*keempat*) Tanggung Jawab: Tanggung jawab BUMDes tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga mencakup kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan mematuhi prinsip kehati-hatian dan melaksanakan tanggung jawab sosial, BUMDes dapat mempertahankan kelangsungan usaha jangka panjang sambil memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan

sekitar. Dengan demikian, pengelolaan BUMDes yang berdasarkan prinsip-prinsip tersebut bukan hanya menciptakan entitas ekonomi yang kuat di tingkat desa, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Ayu Sholehah yaitu sama-sama menunjukkan bahwa BUMDes yang diteliti menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup transparansi melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat, akuntabilitas melalui pelaporan pertanggungjawaban secara vertikal, kewajaran. Potensi yang dimiliki oleh Desa sudah teridentifikasi dengan melihat kepada keadaan geografis yang dimiliki jelas potensi yang dimiliki sangat bagus, sejalan juga dengan dalam praktik *good corporate governance*, yaitu Keadilan, Tanggung Jawab, akuntabilitas dan transparansi.⁴

B. Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes Karyasari Desa Bicolorong Kecamatan Pakong

Badan Usaha Milik Desa 'KARYASARI' Bicolorong menyoroti pentingnya konsistensi, semangat kebersamaan, dan sinergi dari semua pihak terkait, termasuk pengurus, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, masyarakat lokal, dan stakeholder lainnya. Tujuan utama pendirian BUMDes 'KARYASARI' adalah untuk menciptakan perekonomian desa yang kuat, mandiri, dan masyarakat yang sejahtera. Dalam rangka mencapai tujuan ini, dukungan dari berbagai pihak

⁴ Hasanah Dkk, *Manajemen BUMDes untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta, UM Jakarta Press 2021), 21

sangatlah penting. Permintaan akan bimbingan yang berkelanjutan dan program-program pemerintah yang mendukung juga disampaikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengelolaan BUMDes 'KARYASARI'. Harapan besar terletak pada sinergi antara semua pihak terkait untuk memastikan kesuksesan BUMDes dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan pasti memiliki hambatan tersendiri bagi terciptanya kegiatan tersebut. Begitu halnya dalam kegiatan pengembangan desa mandiri yang dilakukan BUMDes yang juga menciptakan beberapa hambatan. Hambatan sendiri berarti faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Permasalahan dalam tatakelola BUMDes dapat memengaruhi keberhasilan dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes didesa.⁵

BUMDes di berbagai desa memiliki usaha atau strategi usahanya sendiri yang sesuai dengan sumber daya yang ada di desa tersebut. beberapa strategi yang bisa digunakan dalam mengembangkan BUMDes ada banyak macamnya, seperti yang memiliki potensi desa pada sektor pariwisata yang dimana peran BUMDes yaitu untuk mengelola tempat wisata yang ada pada desany tersebut menjadi sebuah tempat lokasi wisata yang maju dan bagus sehingga hal tersebut akan memikat berbagai wisatawan dari dalam mupun luar daerah untuk berkunjung ke tempat wisata di desa tersebut. Namun dalam kegiatan BUMDes sendiri memiliki berbagai kendala dalam menjalankan program tersebut. seperti salah satu contoh

⁵ Irfan Nursetiawan, Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. Tahun 2017 vol 6 no 9, 79

yang terjadi pada pengelolaan BUMDes Karyasari yang berada di Desa Bicorong. Pada BUMDes di daerah tersebut mengalami kendala yang menyebabkan tersendat dan terbengkalai, hal tersebut akan menyebabkan BUMDes mengalami penurunan pendapatan yang imbasnya akan diterima oleh desa bahkan juga bisa berdampak pada masyarakat yang ikut serta dalam mengikuti kegiatan BUMDes.⁶

Keberadaan BUMDes pada masyarakat perdesaan kawasan percandian di Desa Bicorong sebagai alternative dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat. Keberadaan anggaran yang kami olah masih sangat minim dan usahapun kami sesuai dengan anggaran yang kami miliki. Keberadaan BUMDes dalam melaksanakan program dan usaha tidak bisa lepas dari anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang. Kesiapan dana usaha terbatas memiliki tingkat kemampuan pengelola usahapun akan mengalami kemunduran. Keberadaan BUMDes pada masyarakat perdesaan yang memiliki potensi ekonomi berupa kawasan percandian dan alam yang indah di Desa Bicorong sebagai alternative dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat. BUMDes dalam mengelola program usaha di tengah masyarakat masih mengalami kendala terutama terbatasnya anggaran yang dimiliki. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes melalui unit-unit usaha yang dimiliki BUMDes dan kelompok-kelompok masyarakat yang bermitradengan BUMDes. Namun masih terdapat hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan dan

⁶ Eka Safitri, *Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Lokal Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu* (fakultas dakwah dan ilmu komunikasi universitas islam negeri raden intan lampung, 2018), 82

pengelolaan BUMDes. Permasalahan yang terjadi adalah adanya potensi desa yang belum bisa dikembangkan melalui BUMDes karena belum adanya modal.

Keterbatasan sumber daya manusia untuk menjalankan BUMDes dan rendahnya wawasan masyarakat desa dapat menjadikan program BUMDes yang direncanakan tidak berjalan lancar. Kurangnya koordinasi yang baik antar pengurus memperburuk program BUMDes yang dijalankan. Perlu adanya pembenahan dari sisi internal BUMDes seperti mencari pengurus yang profesional dalam mengurus kegiatan BUMDes. Pengurus yang dibutuhkan adalah orang-orang yang berkompeten serta memiliki wawasan yang luas untuk memotivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes. Faktor keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes juga menjadi kelemahan dalam mengembangkan BUMDes. Masih banyak pengurus BUMDes yang rangkap jabatan dengan lembaga lainnya, sehingga pengurus lebih fokus ke pekerjaan utamanya daripada fokus ke BUMDes. Pengurus BUMDes juga kesulitan dalam menghadapi peminjam yang menunggak pengembalian pinjaman. Masyarakat desa Muara Jambi menganggap bahwa dana yang dipinjam mereka merupakan dana bantuan dari pemerintah dalam bentuk hibah, sehingga tidak sedikit dana pinjaman BUMDes tidak dikembalikan.

BUMDes sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan. Keterlibatan masyarakat dalam program BUMDes memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha, jadi harus diadakannya pelatihan-pelatihan yang mendukung program BUMDes yang

sedang kelolah agar meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai standar pengelolaan BUMDes. Sedangkan yang terjadi didesa Muaro Jambi masih sangat minim sekali sumber daya manusianya dan masih banyak yang tidak paham mengenai pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan standar pengelolaan BUMDes.

Keberadaan BUMDes masih membutuhkan dukungan semua pihak dalam meningkatkan sumber daya manusia pengelola. BUMDes Karyasari masih kurang kualitas sumber daya manusia atau SDM pengelola BUMDes. Tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat desa yang rendah serta pola pikir masyarakat yang belum terbuka juga mejadi salah satu kendala BUMDes dalam pengembangan desa mandiri. Kapasitas pengurus Bumdes masih lemah .Program ini belum optimal karena masih rendahnya Sumber daya Manusia dan enterpreneurshif dan perlu adanya pelatihan pendukung, guna meningkatkan tata kelola BUMDes secara berkelanjutan.

Karena potensi desa tidak hanya bersumber dari potensi alam, namun bersumber dari potensi yang lain. Dalam hal ini BUMDes Kajang Lako juga belum memiliki peran dalam mengelola dan memanfaatkan potensi desa. Padahal tujuan didirikannya BUMDes adalah merupakan sebagai wadah atau sarana desa dalam memanfaatkan potensi- potensi ekonmi desa yang dapat memberikan sumber PADes. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekayaan potensi Desa Bicolorong belum mampu dikelola dan di manfaatkan dengan maksimal. Kemanfaatan ekonomi desa belum mampu memberikan sumbangan bagi PADes, BUMDes belum mampu dikelola dengan baik sehingga tidak memberikan dampak

pada peningkatan PADes. Seharusnya Potensi ekonomi desa dapat memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui berbagai cara. Dengan memanfaatkan potensi ekonomi desa secara optimal, desa dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) mereka. Namun, penting juga untuk melibatkan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengembangan potensi ekonomi desa agar dapat mencapai peningkatan yang berkelanjutan dalam PADes.

Pemerintah Desa belum melibatkan tenaga ahli dalam mengelola potensi desa. Pelibatan tenaga ahli sangat penting karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Kerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan ahli di bidang terkait dapat membantu mencapai tujuan pengelolaan potensi desa secara optimal. Dalam pelibatan tenaga ahli dimulai dengan identifikasi kebutuhan desa melalui analisis potensi desa. Setelah itu, dilakukan kerja sama dengan lembaga atau organisasi yang memiliki ahli dibidang tersebut. Pelibatan tenaga ahli bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola potensi desa. Kemudian pelibatan tenaga ahli juga untuk memberikan pelatihan, workshop, dan pendampingan kepada masyarakat desa. Dengan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman mereka akan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola potensi desa.

Dalam mengoptimalkan potensi desa melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) pada Desa Bidorong maka dapat dijelaskan bahwa sumber-sumber potensi desa yang ada di Desa Bidorong sangat banyak untuk dikelola oleh

BUMDes untuk dijadikan sumber pendapatan BUMDes agar dapat meningkatkan kinerja BUMDes untuk mengelola dan meningkatkan pendapatan BUMDes, akan tetapi pengurus BUMDes Karyasari belum mampu mengelola potensi desa secara maksimal. Dalam pengelolaan BUMDes dengan sistem manajemen dan sumber daya manusia yang mampu diandalkan maka setiap pengelolaan kelembagaan BUMDes akan berjalan maksimal sesuai dengan tujuan BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk memngelolanya. Kinerja BUMDes Karyasari dalam mengelola potensi desa saat dikatakan tidak maksimal karena minimnya sumber daya manusia yang mengurus badan usaha tersebut, sehingga potensi yang telah digali tidak menunjukkan peningkatan terhadap sumber pengelolaan potensi desa.

Dapat disimpulkan bahwa strategi belum dijalankan dengan baik. Hal tersebut karena dari beberapa indikator strategi yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut masih terdapat kelemahan yaitu pada strategi pemanfaatan. Pada strategi pemanfaatan meskipun semua potensi-potensi yang dimiliki sudah teridentifikasi namun, belum semuanya dapat dimanfaatkan secara maksimal. dalam mengelola potensi desa saat dikatakan tidak maksimal karena minimnya sumber daya manusia yang mengurus badan usaha tersebut, sehingga potensi yang telah ada tidak menunjukkan peningkatan terhadap sumber pengelolaan potensi desa. Meskipun desa memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti potensi pariwisata dan kawasan percandian, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat pengembangan dan pemanfaatan

potensi tersebut secara optimal. Kendala utamanya meliputi kurangnya modal/anggaran dana, lemahnya kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia), dan kurangnya perlibatan tenaga ahli dalam pemanfaatan potensi desa.

Kurangnya modal/anggaran dana menjadi kendala utama karena menghambat pengelolaan potensi ekonomi desa melalui BUMDes. Selain itu, lemahnya kapasitas SDM juga mempengaruhi efektivitas pengelolaan BUMDes, terutama dalam hal koordinasi, manajemen, dan pengetahuan tentang pengelolaan usaha. Selanjutnya, kurangnya perlibatan tenaga ahli dalam pemanfaatan potensi desa juga menghambat pengembangan potensi secara maksimal, sehingga desa tidak dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan optimal.

Dari kesimpulan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kinerja BUMDes dan mengoptimalkan potensi ekonomi desa, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan akses terhadap modal/anggaran dana, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan rekrutmen pengurus yang berkualitas, serta perlibatan tenaga ahli dalam pengelolaan potensi desa. Dengan demikian, desa dapat mengembangkan potensi ekonomi mereka secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Nursetiawan. Dalam pembahasannya jurnal ini yaitu Desa mandiri sebagai bagian dari cita-cita pembangunan nasional terhambat oleh beragam permasalahan yang muncul dalam perwujudannya. Salah satu hal yang paling dominan, yakni di sektor ekonomi dan sektor sosial sektor ekonomi masih banyaknya masyarakat

yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan di sektor sosial, mulai pudarnya prinsip kegotongroyongan khususnya dari segi pemberdayaan di masyarakat perdesaan. Salah satu usaha yang dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan dan mewujudkan kemandirian sebuah desa, yakni dengan pendirian lembaga usaha bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tetapi dalam kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes terdapat beragam permasalahan yang muncul, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Ada tiga sektor yang menjadi fokus dalam usaha realisasi kemandirian sebuah desa, yakni: (a) potensi ekonomi; (b) potensi sosial; dan (c) potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Dimana ketiga hal tersebut tidak terlepas dari adanya inovasi yang diimplementasikan.⁷

C. Kontribusi Pengelolaan BUMDes Karyasari pada Kesejahteraan Desa Bicolorong Kabupaten Pamekasan

Substansi penguatan daerah menjadi segala upaya untuk memperkokoh atau mengubah masyarakat yang menyangkut nilai-nilai (pandangan), perekonomian dan kebudayaan dengan cara yang terpelihara melalui: perluasan kemampuan (informasi, mentalitas, kesanggupan dan tingkah laku), penguatan dukungan dan dorongan, penguatan kualitas sosial dan organisasi sosial, pemanfaatan aset-aset potensial di dekatnya disertai dengan bantuan serius untuk mencapai kemakmuran dan kebebasan daerah setempat. BUMDes lahir sebagai

⁷ Irfan Nursetiawan, Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. Tahun 2017 vol 6 no 9

salah satu metodologi dalam upaya mengembangkan perekonomian lebih lanjut yang tercermin pada hasil sebagai berikut:⁸

1. Pengembangan Usaha: BUMDes sering mengembangkan berbagai jenis usaha di bidang pertanian, peternakan, pariwisata, kerajinan, atau jasa lainnya. Pendapatan dari usaha-usaha ini dapat menjadi sumber pendapatan penting bagi desa.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Melalui BUMDes, masyarakat desa diberdayakan untuk terlibat dalam pengelolaan usaha dan mendapatkan manfaat dari hasilnya. Ini bisa meningkatkan pendapatan mereka secara langsung.
3. Pajak dan Retribusi: BUMDes yang berhasil biasanya memberikan kontribusi pajak dan retribusi kepada pemerintah desa, yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
4. Peningkatan Infrastruktur: Keberhasilan BUMDes dalam menghasilkan pendapatan juga dapat membantu dalam membiayai pembangunan infrastruktur di desa, seperti jalan, jembatan, atau sarana lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
5. BUMDes yang berhasil biasanya memberikan kontribusi pajak dan retribusi kepada pemerintah desa, yang kemudian dapat digunakan

⁸ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktek* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 76

untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Secara umum, negara-negara maju yang sudah sejahtera dan masa kini dari dulu sampai saat ini, dan yang mengejutkan, di masa depan adalah negara-negara yang mempunyai SDM yang dominan, hebat, dan sangat kejam. Dengan demikian, mereka dapat berkembang secara imajinatif dan cerdas tidak hanya dalam mengelola Aset Biasa (SDA) yang bernilai tinggi, namun juga dalam menjadikan aset yang memiliki nilai tambah yang sangat tinggi. Penghargaan tambahan yang ideal terhadap aset-aset biasa sebenarnya ingin mengurangi atau mencoba menghentikan penyelidikan aset rutin seperti yang sering kita lihat terjadi, terutama di negara-negara non-industri. Hal ini berarti bahwa untuk mengurangi kerusakan ekologis dan untuk melaksanakan bantuan pemerintah masyarakat, diperlukan SDM yang baik dengan keseriusan yang tinggi agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilaksanakan (supportable).⁹

Oleh karena itu, suatu negara harus fokus menggarap SDM. Mengingat segala hal, peningkatan aset manusia merupakan sebuah usaha besar dan suatu hal yang menentukan kemajuan negaranya, saat ini dan di kemudian hari. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika terjadi ledakan penduduk (populace blast atau populace pressure) di negara-negara berkembang, yang menjadi salah satu penghambat perbaikan moneter di negara tersebut. Bahkan di negara-negara maju, peningkatan jumlah penduduk sebenarnya akan meningkatkan pendapatan riil per kapita, karena negara-negara tersebut mempunyai dana cadangan yang dapat

⁹ Yearning Harefa, *Ekonomi Pembangunan* (Banten: Umpam Press, 2020)., 17

memenuhi kebutuhan bisnis. Selain itu, pertumbuhan populasi yang cepat akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkreasi dan menjadi sumber minat baru di negara-negara maju. Karena kita menyadari bahwa dari sisi kepentingan, penghuni berperan sebagai pelanggan dan di sisi persediaan, penduduk berperan sebagai pembuat. Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat umumnya tidak menjadi penghalang bagi perkembangan perekonomian, namun hal ini dapat dipahami jika masyarakat memiliki kapasitas yang tinggi untuk menyimpan dan menjual barang.¹⁰

Hal ini berarti bahwa untuk mengurangi kerusakan ekologis dan untuk melaksanakan bantuan pemerintah masyarakat, diperlukan SDM yang baik dengan keseriusan yang tinggi agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilaksanakan (supportable).¹¹

Memperluas jumlah penduduk di suatu negara adalah suatu keuntungan dengan asumsi peningkatan jumlah penduduk tersebut dikoordinasikan menjadi angkatan kerja yang bersertifikat dan akan menjadi modal perbaikan yang signifikan bagi negara-negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang, sehingga hubungan antara penduduk dan jalannya pembangunan keuangan menjadi penting. hubungan terdekat yang sesuai. Hal ini menyiratkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan komitmen yang signifikan terhadap pembangunan moneter dan pembangunan keuangan yang besar akan

¹⁰ Ibid, 18

¹¹ Yearning Harefa, *Ekonomi Pembangunan* (Banten: Umpam Press, 2020)., 17

mempengaruhi kemajuan penduduk suatu negara.¹²

¹² Ibid